

MODEL KOLABORASI LEMBAGA KEUANGAN DAN UNIVERSITAS DALAM MEMPERKUAT AKSES LAYANAN KEUANGAN MIKRO DAN KINERJA USAHA MIKRO DAN KECIL DI INDONESIA

A MODEL OF COLLABORATION OF FINANCIAL INSTITUTIONS AND UNIVERSITIES IN STRENGTHENING ACCESS TO MICROFINANCE SERVICES AND THE PERFORMANCE OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES IN INDONESIA

Suhendi^{*1}, Noer Azam Achsani^{*}), Mukhamad Najib^{**}), Tanti Novianti^{*})

^{*}Sekolah Bisnis, IPB University

Jl. Pajajaran, Bogor 16151, Indonesia

^{**}Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University

Jl. Agatis Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia

Abstract: *Micro and Small Enterprises (MSEs) have an important and strategic role in national economic development. This study aims to identify and analyze problems in the implementation of microfinance services for MSEs in Indonesia and develop a collaborative model involving relevant stakeholders, especially financial institutions and universities, to support microfinance and improve the performance of MSEs in Indonesia. The research method used in this research is Soft Systems Methodology (SSM), utilizing data from FGDs, in-depth interviews, and observations. The results of the study show that financing constraints for MSEs can be seen from two perspectives, namely the MSEs themselves (demand side) and financial institutions (supply side). Collaborative models between various stakeholders, especially between financial institutions and universities, can be an alternative solution to strengthen access to microfinance services and improve the performance of micro and small businesses in Indonesia. In terms of transaction cost theory, universities can reduce the transaction costs of financial institutions through research, education, innovation, and partnerships with financial institutions. Therefore it can be concluded that collaboration between universities and financial institutions can make a valuable contribution to developing more efficient and cost-effective solutions in the financial industry, especially in increasing access to microfinance services and the performance of MSEs in Indonesia.*

Keywords: *catwoe, collaborative intervention, financial system, rich picture, soft system methodology*

Abstrak: Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Studi ini bertujuan ini mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dalam implementasi layanan keuangan mikro (*microfinance*) bagi pelaku UMK di Indonesia dan mengembangkan model kolaboratif yang melibatkan pemangku kepentingan terkait, terutama lembaga keuangan dan universitas, untuk mendukung keuangan mikro dan meningkatkan kinerja UMK di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Soft Systems Methodology* (SSM), dengan memanfaatkan data dari FGD, wawancara mendalam, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala pembiayaan bagi UMK dapat dilihat dari dua perspektif yaitu MSEs itu sendiri (sisi permintaan) dan lembaga keuangan (sisi penawaran). Model kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan, khususnya antara lembaga keuangan dan perguruan tinggi, dapat menjadi solusi alternatif untuk memperkuat akses layanan keuangan mikro dan meningkatkan kinerja usaha mikro dan kecil di Indonesia. Dalam kaitan dengan teori biaya transaksi, Universitas dapat mengurangi biaya transaksi lembaga keuangan dengan melalui penelitian, pendidikan, inovasi, dan kemitraan dengan lembaga keuangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi universitas dengan lembaga keuangan dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk mengembangkan solusi yang lebih efisien dan hemat biaya dalam industri keuangan khususnya dalam meningkatkan akses layanan keuangan mikro dan kinerja UMK di Indonesia.

Kata kunci: *catwoe, collaborative intervention, financial system, rich picture, soft system methodology*

Riwayat artikel:

Diterima
13 Juni 2023

Revisi
31 Juli 2023

Disetujui
4 Agustus 2023

Tersedia online
30 September 2023

This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



¹ Alamat Korespondensi:

Email: suhendi.sb@apps.ipb.ac.id

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional (Octasyilva, 2021). Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia, UMKM juga berperan dalam pembangunan pedesaan, pertumbuhan kewirausahaan perempuan, dan produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga kelas menengah ke bawah (Tambunan, 2018). UMKM pada tahun 2019 mempunyai tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 96,92% dari seluruh tenaga kerja nasional dan mempunyai kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,51% (KemenkopUKM, 2020). UMKM juga telah terbukti mampu hidup dan berkembang di masa krisis melanda Indonesia (BPS, 2019). Jumlah usaha mikro dan kecil (UMK) masih sangat dominan dalam struktur ekonomi nasional yaitu sebesar 99,80% dari keseluruhan jumlah unit usaha di Indonesia, sementara jumlah usaha menengah dan besar hanya kurang dari satu persen (KemenkopUKM, 2020).

Dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan UMK terdapat banyak permasalahan yang harus diselesaikan salah satunya permasalahan permodalan (Tambunan, 2012; Levie *et al.* 2014; Urata, 2020). Sensus Ekonomi Indonesia tahun 2016 yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa kendala utama dari usaha mikro dan kecil yang ada di Indonesia adalah masalah permodalan yaitu sebesar 60,14% (BPS, 2019). Pelaku usaha UMK masih belum optimal dalam memanfaatkan pembiayaan usaha melalui kredit bank. Disisi lain lembaga keuangan seperti perbankan selama lima tahun terakhir realisasi penyaluran kredit UMK masih dibawah 20% padahal dengan ketentuan PBI No.17 Tahun 2015 mewajibkan perbankan untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM paling rendah sebanyak 20% dari total kredit.

Seluruh ekosistem pembiayaan sudah beralih pada sistem pembiayaan inklusif yang tujuan utamanya untuk memberikan berbagai layanan pembiayaan/keuangan kepada kalangan miskin dan berpenghasilan rendah (Reddy, 2017; Robinson, 2001). Guna mendukung pembiayaan untuk UMK telah banyak dikeluarkan kebijakan dan program-program pembiayaan keuangan inklusif dan layanan keuangan mikro (*microfinance*) oleh pemerintah diantaranya pemerintah telah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dimulai sejak tahun 2007. Tujuan adanya KUR tersebut

bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Tercatat dari tahun 2015–2018, KUR yang tersalurkan baru sebesar 13.258.016 UMKM dengan total *plafon* sebesar Rp 317 Triliun (Kemenko, 2018). Jumlah UMK yang menerima KUR tersebut hanya 21,07 % dari total UMK yang ada di Indonesia. Dengan demikian, masih banyak UMK di Indonesia yang belum tersentuh bantuan permodalan. Pada tahun 2016 sebagai upaya meningkatkan penetrasi keuangan mikro pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 82 tahun 2016 Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Kondisi di atas menunjukkan terdapat permasalahan baik dari sisi UMK untuk mengakses permodalan maupun dari sisi lembaga keuangan untuk memberikan permodalan. Tidak hanya dari sisi kuantitas nilai kredit yang harus ditingkatkan yang saat ini masih jauh dari target, namun dari sisi kualitas juga perlu diperhatikan. Dari seluruh bank yang menyalurkan kredit, tidak semuanya memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai mengenai UMK. UMK masih terbatas sebagai objek penerima modal oleh lembaga keuangan, namun upaya penguatan usahanya masih relatif terbatas dilakukan. Padahal keberhasilan usaha sangat berpengaruh pada kinerja UMK yang berdampak pada tingkat *non-performing loan* (NPL) bagi lembaga keuangan.

Disisi lain telah banyak lembaga yang membantu memberdayakan dan meningkatkan kapabilitas dari UMK, salah satunya adalah universitas. Universitas merupakan salah satu aktor pada sistem inklusi keuangan yang berperan pada *supporting services* (World Bank, 2006). Universitas sebagai *center of excellence* seyogyanya mampu berkontribusi dalam membantu akses pembiayaan dan penguatan usaha untuk UMK serta mengakselerasi program-program pemerintah dan lembaga keuangan. Namun saat ini bermunculan kritik yang ditujukan kepada universitas yang menyebut bahwa universitas menjadi menara gading (Matthews, 2022). Aktivitas universitas makin terpisahkan dan relatif menjaga jarak dari realitas sosial di sekitarnya. Kampus akan menjadi semakin sulit diharapkan untuk dapat memberi kontribusi kreatif pada penyelesaian masalah-masalah sosial dan memiliki program-program sosial inovatif. Matthews (2022) menyebutkan bahwa saat ini universitas mampu berperan lebih besar dalam menyelesaikan masalah sosial dengan melakukan kolaborasi dan interaksi antar pelaku yang terlibat. Dalam konteks ini

kolaborasi universitas dapat dilakukan dengan berbagai pelaku untuk membantu UMK mendapatkan akses pembiayaan dan penguatan usaha serta membantu lembaga keuangan dan pemerintah dalam menyalurkan pembiayaan ke UMK. Kerjasama yang dijalankan saat ini masih belum komprehensif, terstruktur dan terintegrasi dengan upaya-upaya yang secara khusus untuk meningkatkan akses UMK terhadap pembiayaan dan meningkatkan usaha dari UMK. Program seolah-olah berjalan masing-masing dengan tanpa mengkaitkan permasalahan pembiayaan UMKM secara detail. Oleh karena ditetapkan hipotesis pada studi ini yaitu model kolaborasi Lembaga Keuangan dan Universitas yang komprehensif, terstruktur dan terintegrasi dapat memperkuat akses layanan keuangan mikro dan kinerja UMK Di Indonesia

Penelitian ini berkontribusi terhadap literatur dalam dua hal utama: Pertama, artikel ini mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dalam sistem implementasi layanan keuangan mikro (*microfinance*) bagi pelaku UMK di Indonesia. Permasalahan diidentifikasi secara komprehensif dan dipetakan sistem keterkaitan yang terjadi satu dengan yang lainnya dan dianalisis secara terintegrasi. Kedua, makalah ini menghasilkan model kolaborasi antara pelaku terkait khususnya lembaga keuangan dan universitas dalam mendukung *microfinance* dan penguatan kinerja UMK di Indonesia. Fokus analisis pada penelitian ini adalah pada usaha mikro dan kecil di Indonesia yang secara jumlah mencapai 99,8% dari usaha di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder dihimpun dari sejumlah publikasi yang diterbitkan oleh instansi dan lembaga terkait seperti Bank Indonesia, BPS, *World Bank*, dan data-data relevan lainnya khususnya jurnal-jurnal ilmiah baik dalam maupun luar negeri. Data primer diambil untuk memperoleh model dan strategi terbaik dari para pakar dan informan pada bidangnya. Pakar dan informan yang digunakan berjumlah 15 orang yang berlatar belakang sebagai pelaku UMK (2 orang), akademisi (3 orang), lembaga keuangan (8 orang), lembaga penjamin (1 orang) dan pemerintah (1 orang). Pendalaman dilakukan dengan melakukan analisis *benchmarking* pada beberapa lembaga keuangan di Indonesia diantaranya PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI), PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk

(BTPN) dan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Mandiri. Penelitian dilakukan sejak bulan Oktober 2022 hingga bulan Mei 2023.

Secara umum metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Soft System Methodology* (SSM). SSM menggunakan pendekatan terstruktur untuk memahami suatu masalah, membangun mode konseptual, mendapatkan kelayakan dan perubahan yang diinginkan serta mengimplementasikannya (Checkland dan Poulter, 2006). Hal ini sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yang ingin melihat kesatuan sistem dalam implementasi *microfinance* dimana analisis yang dilakukan merupakan satu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lainnya dalam suatu lingkungan yang kompleks. Penelitian menggunakan kerangka SSM yang menggunakan 7 (tujuh) tahapan dimana dalam penelitian ini tahapan-tahapan tersebut didukung oleh pendekatan dan metode/alat analisis yang sesuai masing-masing tahapan diantaranya studi literatur, analisis *benchmarking*, *rich picture*, *CATWOE* (*client, actors, transformation, world view, owner and environmental constraints*) dan *PAM* (*Purposeful Activity Model*) (Gambar 1).

HASIL

Kondisi Eksisting Layanan Keuangan Mikro di Indonesia dan Permasalahannya

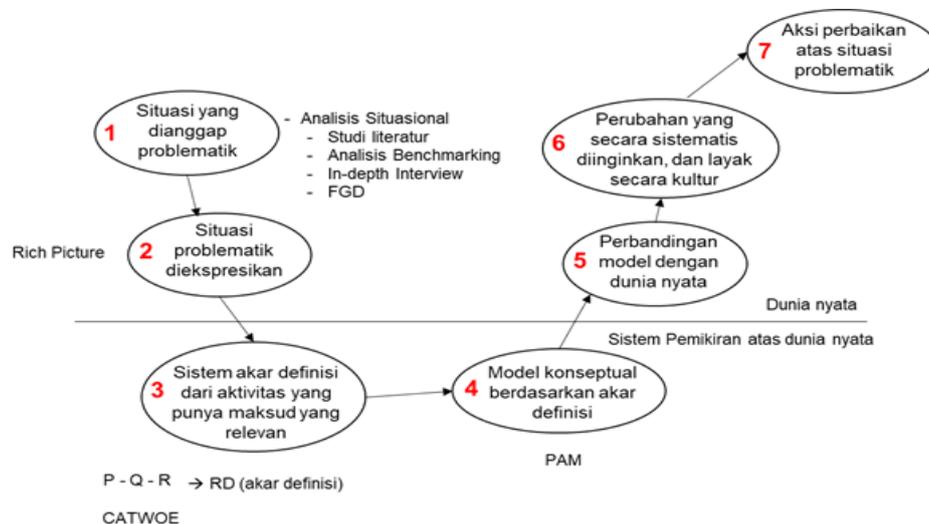
Pembiayaan merupakan salah satu faktor kunci dalam pengembangan UMK, namun demikian masih banyak UMK yang belum mendapatkan akses pembiayaan sehingga pengembangan usahanya jadi terkendala. Indonesia telah memiliki program pemerintah maupun pinjaman komersial untuk pembiayaan UMK. Beberapa program pemerintah diantaranya Kredit Usaha Rakyat (KUR), Ultra Mikro (Umi), Pegadaian Kreasi Umi, Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM), pembiayaan Ultra Mikro BAV-Umi, LPDB-KUMKM maupun pinjaman komersial dari perbankan umum, BPR dan institusi lainnya. Sensus Ekonomi tahun 2016 menunjukkan bahwa 88,30% usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak memperoleh atau mengajukan kredit ke lembaga keuangan dan hanya 11,70% yang memperoleh atau mengajukan kredit dari lembaga keuangan. Beberapa alasan usaha mikro dan kecil tersebut tidak mengajukan atau memperoleh kredit diantaranya adalah suku bunga yang tinggi, tidak memiliki agunan, tidak mengetahui prosedur pengajuan kredit, prosedur yang dirasa

menyulitkan dan ditolaknya usulan kredit. Pelaku usaha UMK masih belum optimal dalam memanfaatkan pembiayaan usaha melalui kredit bank. Hal tersebut juga dapat dilihat dari realisasi penyaluran kredit UMK oleh perbankan selama lima tahun terakhir masih dibawah 20%.

Merujuk pada studi literatur, analisis *benchmarking microfinance* dan wawancara langsung terhadap pakar dan penggiat UMK, diketahui bahwa hambatan dalam akses pembiayaan yang dihadapi oleh UMK dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi UMK (*demand side*) dan lembaga keuangan (*supply side*). Terdapat enam hambatan *demand side* UMK yang menyebabkan sulitnya UMK mengakses pembiayaan. Hambatan pertama yaitu *socio-culture*, yaitu banyak pelaku usaha UMK khususnya yang berada di daerah pelosok serta wilayah pedesaan yang masih menganut budaya kekeluargaan yang kental. Mereka akan lebih memilih mengajukan pinjaman ke lembaga non-perbankan seperti koperasi atau Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan ritme kehidupan masyarakat dan memiliki prosedur yang lebih sederhana (Kusmuljono 2009). Hambatan kedua yaitu UMK tidak memenuhi persyaratan dalam mengakses pembiayaan di lembaga keuangan formal. Diperlukan dokumen legalitas serta administrasi yang harus dipenuhi oleh UMK untuk bisa memperoleh pembiayaan. Hartato (2021) menyebutkan bahwa kendala yang menghambat akses UMK kepada layanan sistem perbankan yaitu pencatatan laporan keuangan yang relatif belum tertata serta legalitas UMK. UMK yang cenderung melengkapi dokumen legalitas atau administrasi adalah UMK yang bentuk usahanya sudah berbadan hukum.

Hambatan ketiga yaitu rendahnya literasi keuangan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghasilkan bahwa literasi keuangan pelaku UMK di Indonesia hanya sebesar 49,68% (OJK, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa hampir separuhnya jumlah UMK yang ada di Indonesia masih belum memanfaatkan produk dan jasa layanan keuangan secara optimal. Padahal literasi keuangan mempengaruhi inklusi keuangan (Natalia et al. 2020) Hambatan keempat yaitu UMK menilai adanya prosedur perbankan yang rumit. Masih kecilnya kontribusi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada UMK disebabkan sulitnya UMK mengakses LKM karena prosedur yang cukup menyulitkan dan bunga yang dipersepsikan masih cukup tinggi (Anggraeni dan Herlinawati, 2019).

Hambatan kelima yaitu masih rendahnya pemahaman dan penggunaan teknologi bagi UMK. Lebih dari 40% pengusaha UMK berpendidikan Sekolah Dasar (SD) atau tidak tamat SD (BPS, 2019). Rendahnya kualitas SDM UMK menyebabkan penerimaan pelaku usaha UMK terhadap produk pembiayaan dalam bentuk *Fintech (Financial Technology)* masih menjadi tantangan besar bagi lembaga keuangan di Indonesia. Hambatan keenam yaitu tingginya suku bunga pinjaman menjadi faktor UMK enggan melakukan pembiayaan keuangan di Perbankan. Besarnya tingkat suku bunga menjadi salah satu faktor penentu bagi UMK untuk memutuskan mengambil pinjaman. Calon debitur akan mempertimbangkan besaran suku bunga kredit, tingginya biaya yang dibayarkan oleh debitur akan menurunkan minatnya dalam mengambil kredit (Huda 2019; Uddin et al. (2017).



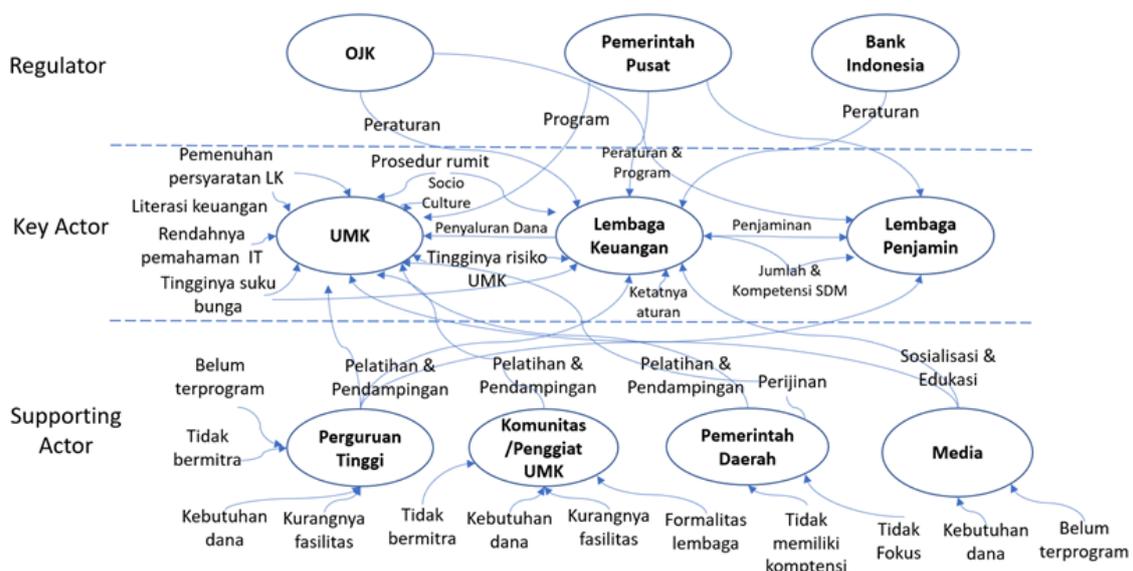
Gambar 1. Kerangka Penelitian Didasarkan pada Siklus Pembelajaran SSM

Hambatan yang berasal dari lembaga keuangan (*supply side*) diantaranya yaitu pertama, tingginya resiko *non performing loan* (NPL). NPL merupakan indikator resiko kredit, semakin tinggi nilai NPL, maka akan mengurangi penyaluran kredit UMK untuk mengurangi resiko yang dapat merugikan perbankan. Perbankan akan menurunkan jumlah penyaluran kreditnya untuk menghindari terjadinya resiko kredit macet yang lebih besar. Hambatan kedua yaitu terbatasnya SDM, dalam menyediakan layanan keuangan bagi UMK, lembaga keuangan juga dihadapkan pada permasalahan SDM yaitu jumlahnya yang masih terbatas untuk mencari UMK potensial secara lebih luas.

Hambatan ketiga yaitu ketatnya pemenuhan persyaratan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic dan Collateral*). Terpenuhinya unsur-unsur dari 5C dapat menjadi pedoman bagi bank bahwa calon nasabah yang bersangkutan memenuhi syarat mendapatkan kredit, dan selanjutnya memasuki proses persetujuan kredit serta perjanjian kredit. Lembaga keuangan akan menjadi selektif dalam menentukan UMK yang akan menerima pembiayaan, sehingga hanya UMK yang memenuhi persyaratan yang dapat diberikan bantuan. Hambatan yang keempat yaitu SDM tidak memiliki kompetensi, mengenal dan akses ke UMK. Staf lembaga keuangan memiliki pengetahuan yang relatif terbatas tentang sektor-sektor usaha dimana UMK beroperasi, serta kurang proaktif dalam mengakses informasi tentang jumlah dan kebutuhan UMK, khususnya terkait kredit yang UMK butuhkan (ILO, 2019)

Strukturisasi Permasalahan dengan menggunakan Rich Picture

Berdasarkan kondisi eksisting (analisis situasional) sebagaimana dijelaskan di atas tahap selanjutnya dalam SSM adalah menyusun *rich picture*. *Rich picture* merupakan upaya mengidentifikasi berbagai sudut pandang untuk mendapatkan pengertian yang sama yang mewakili stakeholder terkait dan kepentingannya. Pada *Rich picture* pengetahuan ditampilkan dalam bentuk grafis dan atau kartunis (Soetara *et al.* 2019). *Rich picture* dapat menstrukturkan permasalahan yang terjadi di antara pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil studi literatur, analisis *benchmarking* dan diskusi dengan pakar diperoleh *rich picture* sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2. Gambar tersebut menunjukkan hubungan antar pemangku kepentingan dan keterkaitan antar permasalahan yang dihadapi pada program pembiayaan untuk UMK. Para pemangku kepentingan dibagi kedalam tiga klaster yaitu klaster regulator yaitu OJK, Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia yang berperan menetapkan kebijakan dan program-program pembiayaan/bantuan permodalan untuk UMK. Klaster kedua yaitu klaster *key actor* yaitu UMK, Lembaga Keuangan dan Lembaga Penjamin yang berperan langsung dalam transaksi memberikan dan menerima permodalan serta menjamin proses permodalannya, dan klaster ketiga yaitu *supporting actor* yaitu perguruan tinggi/universitas, komunitas, pemerintah daerah dan media yang berperan menjadi lembaga pendukung untuk mengakselerasi program-program terkait pembiayaan untuk UMK.



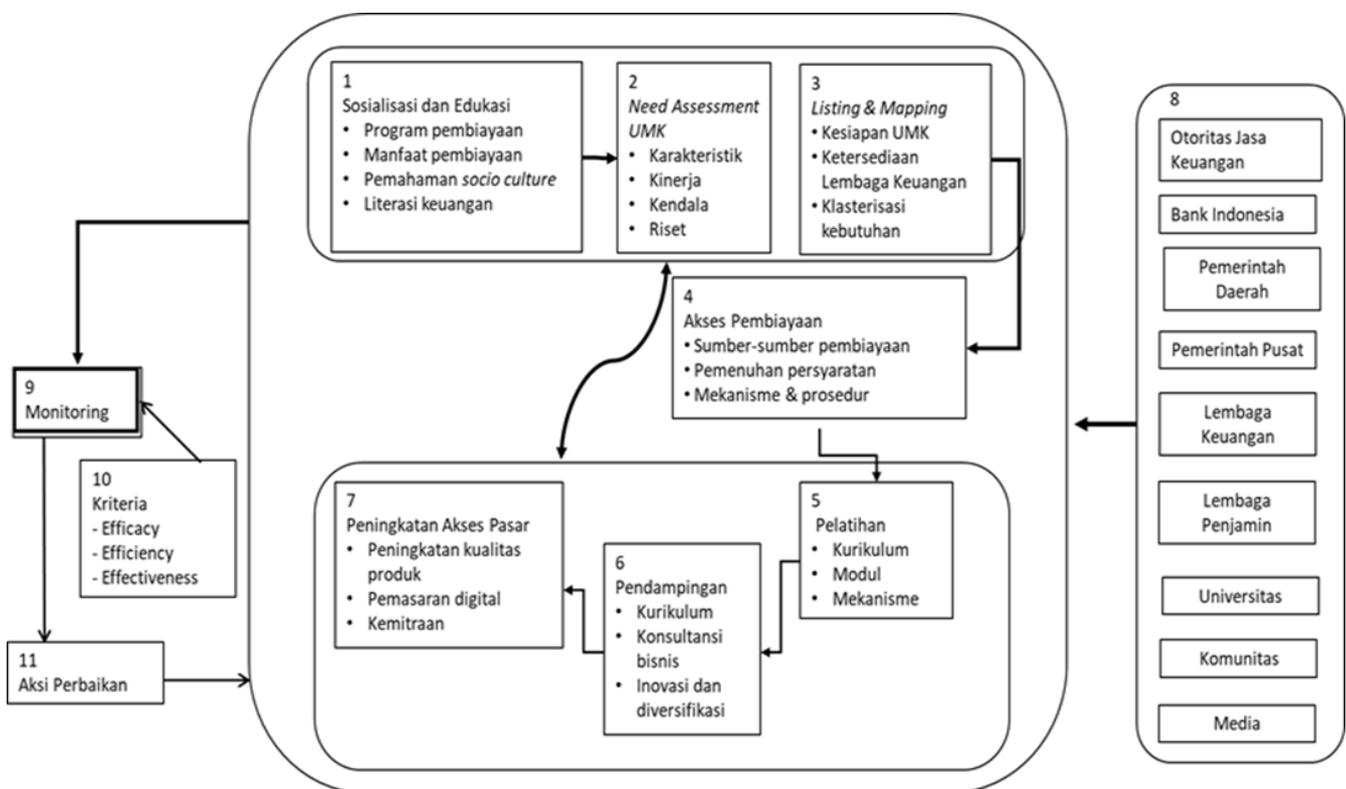
Gambar 2. Rich picture hubungan keterkaitan antar pelaku dan permasalahannya dalam program pembiayaan untuk UMK

CATWOE Analysis dan Model Konseptual

Pada SSM setelah permasalahan distrukturkan menggunakan *rich picture* selanjutnya yang dilakukan adalah *Root Definitions of Relevant Systems*, yaitu mengkaitkan masalah terhadap sistem yang ada, yang dilanjutkan dengan membuat *root definitions* yang menjelaskan proses/transormasi untuk mencapai tujuan (To do X, by Y, to achieve Z), untuk menguji *root definitions* tersebut dengan melakukan analisis CATWOE (*Customer, Actor, Transformation, World view, Owner, Environment*). CATWOE didasarkan hasil analisis situasional (permasalahan). Kemudian ditentukan sub elemen kunci dari masing-masing elemen sebagai dasar membangun model konseptual berdasarkan analisis situasional, dan diskusi dengan para pakar. Hasil CATWOE diantaranya C yaitu UMK, Lembaga Keuangan; A yaitu UMK, Lembaga Keuangan, Pemerintah, Universitas, Komunitas, Media; T yaitu Peningkatan efektivitas dan perluasan akses pembiayaan untuk UMK serta penguatan usaha UMK dengan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi melalui program terintegrasi dengan kolaborasi antar pemangku kepentingan; W yaitu program terintegrasi melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan akan memberikan manfaat bagi UMK dalam meningkatkan

akses pembiayaan dan meningkatkan kinerja UMK serta meningkatkan kesejahteraan UMK maupun kinerja lembaga keuangan; O yaitu Pemerintah, UMK, dan Lembaga Keuangan; dan E yaitu sosial-budaya, koordinasi, ketersediaan dana.

Merujuk kepada identifikasi permasalahan dan analisis CATWOE, dirumuskan model konseptual untuk penguatan akses layanan keuangan mikro dan peningkatan kinerja UMK Gambar 3. Model konseptual sebagai entitas sistem baru yang disusun dengan aktivitas yang memiliki maksud dalam pemikiran atas dunia nyata yang dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Model konseptual menekankan pada peningkatan akses layanan keuangan mikro dan penguatan kinerja UMK. Model konseptual mengandung kegiatan-kegiatan yang terhubung secara logis yang bilamana dikombinasikan bersama menghasilkan perwujudan tujuan sistem. Model konseptual ini merujuk pada model kolaborasi yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi UMK dan lembaga keuangan dalam peningkatan akses layanan keuangan mikro dan penguatan kinerja UMK.



Gambar 3. Model konseptual kolaborasi penguatan akses layanan keuangan mikro dan peningkatan kinerja umk

Model konseptual dari model kolaborasi terbagi dalam tiga bagian besar yaitu bagian aktivitas peningkatan akses pembiayaan UMK dan penguatan kinerja UMK yaitu aktivitas 1-7, bagian aktor yang berperan menjalankan aktivitas yaitu nomer 8 dan bagian untuk memastikan penerapan aktivitas berjalan secara berkesinambungan. Untuk penguatan akses layanan keuangan mikro dan peningkatan kinerja UMK berawal dari aktivitas (1) Sosialisasi dan edukasi terhadap program pembiayaan dan literasi keuangan (2) melakukan analisis terhadap kebutuhan dan karakteristik dari UMK (*need assessment*) (3) menetapkan *listing* dan *mapping* terhadap UMK. Selanjutnya dalam aktivitas (4) pemberian pembiayaan

bagi UMK yang selanjutnya dilakukan (5) pelatihan, (6) pendampingan yang selanjutnya pada aktivitas (7) peningkatan akses pasar. Aktivitas-aktivitas tersebut dijalankan melalui kolaborasi dari 9 (sembilan) aktor yang dapat berperan yaitu OJK, BI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan, Lembaga Penjamin, Universitas, Komunitas/Grup dan Media. Selanjutnya aktivitas dan aktor dimonitor dan evaluasi untuk kesinambungan dari aktivitas dan tujuan yang ingin dicapai. Adapun perbandingan antara model konseptual dengan kondisi eksisting ditunjukkan pada Tabel 1. Tabel tersebut membandingkan aktivitas yang ada pada model konseptual sebagaimana pada Gambar 3 dengan kondisi eksisting.

Tabel 1. Perbandingan Kondisi Eksisting dan Model Konseptual

Kriteria	Kondisi Eksisting	Model Konseptual (Arah Perbaikan)
Sosialisasi dan Edukasi	Sosialisasi dan edukasi dilakukan oleh lembaga keuangan yang jumlahnya dan sarannya terbatas. Sosialisasi dan edukasi hanya terbatas pada program pembiayaan belum pada penguatan literasi keuangan dan sosio culture. Dilakukan tidak terprogram dan terintegasi	Sosialisasi dan edukasi dilakukan secara masif dan terprogram serta dapat dilakukan oleh berbagai stakeholders seperti pemerintah, universitas dan institusi lainnya. Sosialisasi dan edukasi tidak hanya terkait program pembiayaan namun juga terkait literasi keuangan dan aspek socio culture dikaitkan dengan aspek pembiayaan/permodalan.
Need Assessment UMK	Belum dilakukan need assessment untuk memetakan kebutuhan UMK sesuai dengan karakteristiknya sebelum mendapat pendanaan. Pencarian dan pengenalan UMK belum terprogram dan hanya di screening dalam waktu yang cepat (pencapaian target). Lembaga keuangan belum fokus melakukan klasterisasi terhadap UMK secara detail.	Dilakukan need assessment terhadap UMK khususnya mengenal lebih jauh karakteristik UMK, kinerja saat ini dan klasterisasi UMK hingga kendala-kendala yang dihadapi. Karakteristik dan kinerja UMK akan menentukan perlakuan dan kebutuhan dari UMK.
<i>Listing & Mapping</i> ketersediaan & kesanggupan	Lembaga keuangan tidak melakukan <i>listing</i> dan <i>mapping</i> yang detail terhadap tingkat kesanggupan dan kinerja UMK serta konsekuensinya. <i>Listing</i> dan <i>mapping</i> lebih kepada persyaratan administratif. Pinjaman/ permodalan diberikan oleh lembaga keuangan umumnya atas pengajuan aktif UMK	<i>Listing</i> dan <i>mapping</i> dilakukan dengan detail dan tidak hanya untuk kebutuhan administratif namun juga terkait pengembangan usahanya. Pinjaman diberikan oleh lembaga keuangan tidak hanya atas pengajuan aktif UMK namun juga atas rekomendasi pihak tertentu yang didasarkan pada analisis kebutuhan.
Akses Pembiayaan	Kewajiban untuk membayar UMK umumnya belum disesuaikan dengan karakteristik UMK. Konsekuensi, komitmen dan kewajiban tidak dipahami secara baik.	Konsekuensi, komitmen dan kewajiban dijelaskan dan dipehami dengan baik dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kinerja UMK. Keluarga perlu dilibatkan dalam menyepakati kesediaan dan komitmen
Pelatihan	Pelatihan banyak diberikan namun tidak terprogram hanya bersifat insidental dan tidak berdasar kebutuhan UMK. Pelatihan tidak terintegrasi dengan program pembiayaan.	Pelatihan dilakukan dengan kurikulum dan modul yang jelas sesuai dengan kebutuhan UMK. Pelatihan dapat dilakukan sebelum dan atau sesudah mendapatkan pendanaan
Pendampingan	Masih terbatas sprogram pendampingan yang fokus dan terintegrasi dalam pengembangan UMK yang dikaitkan dengan akses pembiayaan (pinjaman kredit).	Dilakukan program pendampingan yang fokus dan terintegrasi dalam pengembangan UMK yang dikaitkan dengan akses pembiayaan (pinjaman kredit). Memiliki kurikulum, periode dan mekanisme yang terprogram dengan baik. Pendampingan dapat dilakukan sebelum dan sesuai mendapatkan pendanaan
Peningkatan akses pasar	Akses pasar UMK saat ini masih bersifat mandiri dan sederhana, keterbatasan pemahaman, networking yang rendah, dan kualitas produk yang kurang baik menyebabkan akses pasar UMK masih sangat terbatas	Akses pasar UMK ditingkatkan dengan memberikan pemahaman terhadap peningkatan kualitas produk, menginisiasi digital marketing dan memfasilitasi jaringan kemitraan.

Model Kolaborasi Lembaga Keuangan Dan Universitas Dalam Penguatan Akses Pembiayaan Dan Peningkatan Kinerja UMK Di Indonesia

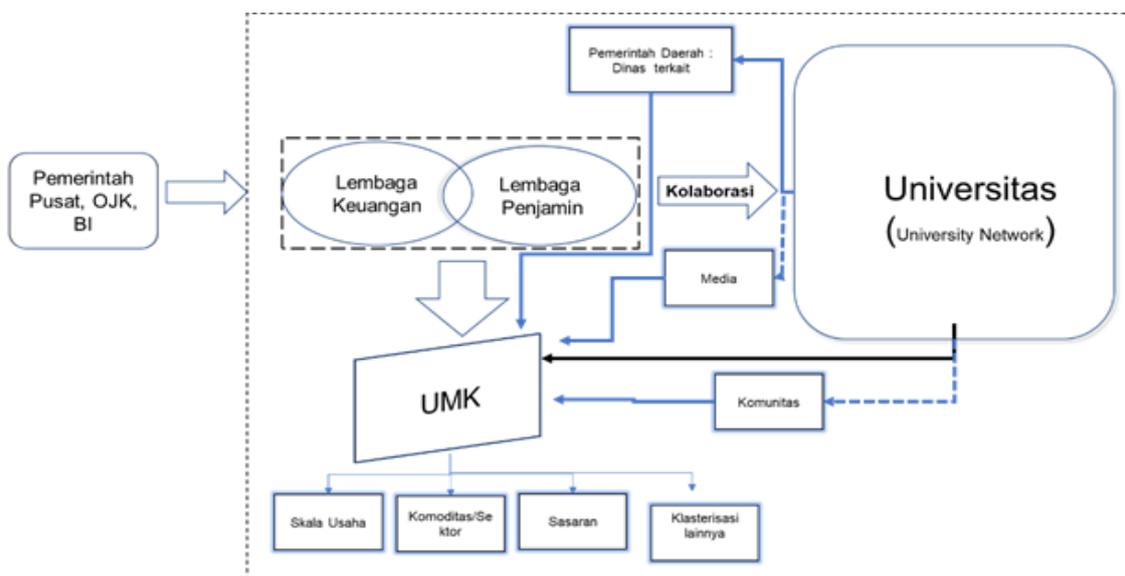
Merujuk pada permasalahan yang telah diidentifikasi dan model koseptual yang telah disusun ditunjukkan bahwa peran antar pemangku kepentingan menjadi sebuah keharusan. Masing-masing pelaku dapat berperan sesuai dengan tugas dan kompetensi yang dimiliki. OJK, Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia berperan menetapkan kebijakan dan mengawasi lembaga keuangan dan memiliki peran dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal yang terjadi di masyarakat. Lembaga Keuangan melaksanakan pengelolaan dana sesuai dengan kebutuhan UMK dan memfasilitasi dana dan infrastruktur dalam mendukung program pembiayaan untuk UMK. Lembaga Penjamin dapat menjadi mitra lembaga keuangan untuk menjadi penjamin dana yang disalurkan ke UMK. Selanjutnya Pemerintah Daerah dapat membarikan data, perijinan, sertifikasi, pelatihan dan edukasi. Membantu akses UMK terhadap pasar (pemeran, ekspor, *link* industri besar). Universitas Sebagai *Centre of excellent* yang dapat membantu UMK dan lembaga keuangan dalam melakukan pelatihan, pendampingan, riset dan aktivitas lainnya sesuai dengan kebutuhan. Komunitas/penggiat UMK membantu UMK dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan. Media membantu dalam sosialisasi dan edukasi untuk UMK dan masyarakat dalam aktivitas pembiayaan dan UMK sendiri sebagai penerima manfaat dari aktivitas dan program yang dijalankan.

Secara umum disebutkan peran dari masing-masing pelaku, akan tetapi pada tataran implementasinya saat ini terdapat keterbatasan dan ketidakterpaduan aktivitas/program yang dijalankan. Aktivitas/program yang dijalankan tidak saling koordinasi dan terintegrasi, oleh karena itu kolaborasi yang terintegrasi antar *stakeholder* menjadi sesuatu keharusan. Inklusi keuangan dapat dicapai melalui intervensi kolaboratif (*collaborative intervention*) dari berbagai pemangku kepentingan (Ozili, 2020). Upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk mengakselerasi akses UMK ke layanan keuangan formal. Pada Gambar 4 dan 5 ditunjukkan model kolaborasi dan keterkaitan antar *stakeholder* serta root cause analysis.

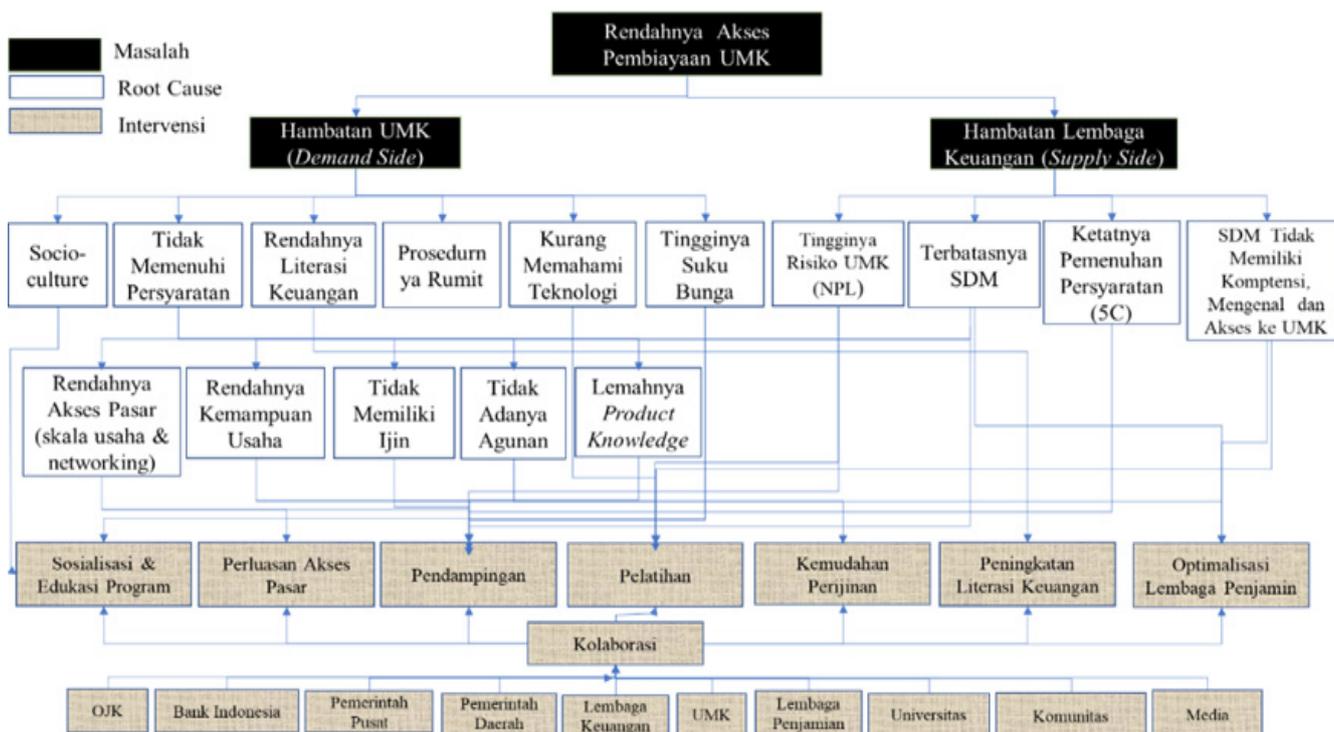
Pada Gambar 4 dan 5 dikaitkan dengan permasalahan pada *rich picture* ditunjukkan bahwa universitas memiliki potensi dan peran besar baik terkait kemungkinan kolaborasi maupun kemampuan menjawab permasalahan

yang dihadapi oleh UMK dalam mengakses layanan keuangan formal maupun peningkatan usahanya. Begitu pun universitas mampu menjembatani permasalahan-permasalahan yang dihadapi lembaga keuangan untuk menyalurkan pembiayaannya. Universitas tersebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga memungkinkan universitas dapat memberikan kontribusi dan gerakan yang besar dalam membantu keuangan inklusif di Indonesia. *World Bank* (2006) dalam buku yang berjudul *Accessfor All: Building Inclusive Financial Systems* menyebutkan bahwa universitas dapat berperan pada *meso level* yaitu sebagai *supporting services*. Dalam hal ini universitas dapat berperan melakukan aktivitas-aktivitas untuk mendukung UMK dan lembaga keuangan. Kolaborasi antara lembaga keuangan dan universitas ditunjukkan pada Gambar 6. Aktivitas seperti *need assessment* UMK, penyusunan kurikulum, pelatihan, pendampingan, akses pasar, riset, *case study* untuk mahasiswa, inkubator bisnis, program *internship*, seminar, program *degree* dan sertifikasi hingga penjamin UMK dapat dilakukan oleh universitas untuk membantu lembaga keuangan. Disisi lain lembaga keuangan dapat membantu dalam pendanaan baik untuk program maupun beasiswa, fasilitasi sarana dan prasarana, memberikan akses network dan *internship* hingga mengirimkan SDM untuk meningkatkan kompetensinya.

Terdapat beberapa alternatif skema pembiayaan untuk kolaborasi antara Lembaga Keuangan dengan Universitas. *Pertama sharing cost* antara lembaga keuangan dan perguruan tinggi. Dana bersumber dari dua institusi yaitu lembaga keuangan dan perguruan tinggi. Besaran dana sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. *Kedua*, Program Pemerintah. Dana bersumber dari dana pada program-program pemerintah yang diperuntukkan untuk pengembangan pembiayaan atau pendampingan UMK. Program-program pemerintah dikementerian pendidikan, kementerian koperasi dan UKM, kementerian keuangan seperti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Kedai Reka (*matching fund*), Hibah penelitian, program pendampingan dan program sejenis lainnya dapat diintegrasikan dengan aktivitas pada kolaborasi ini. Dana program pemerintah ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan dan universitas untuk menjalankan aktivitas kolaborasi dalam meningkatkan akses pembiayaan dan kinerja UMK. *Ketiga*, Dana CSR dan operasional lembaga keuangan. Dana yang bersumber dari dana CSR dan atau dana operasional lembaga keuangan digunakan untuk aktivitas kolaborasi.



Gambar 4. Model kolaborasi antar *stakeholder* untuk penguatan akses layanan keuangan mikro dan penguatan kinerja UMK di Indonesia



Gambar 5. *Root Cause Analysis* Program Pembiayaan untuk UMK

Dalam konteks teori biaya transaksi (*transaction cost theory*) adanya alternatif skema pembiayaan sebagaimana disebutkan di atas. Universitas dapat mengurangi biaya transaksi lembaga keuangan dalam melakukan penelitian, pendidikan, inovasi, dan kemitraan dengan lembaga keuangan. Disamping itu beberapa universitas memiliki inkubator atau program akselerator yang mendukung pengembangan ide-ide

inovatif di bidang keuangan. Dengan menyediakan fasilitas, mentor, dan sumber daya lainnya, universitas dapat membantu mengurangi biaya transaksi lembaga keuangan melalui pengembangan solusi baru yang lebih efisien dan hemat biaya. Biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh lembaga keuangan bisa lebih efisien dan lebih tepat sasaran

Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil dari studi ini dirumuskan implikasi manajerial yang terbagi pada tiga level yaitu level makro (*regulator & supervision*/Pemerintah & OJK), level meso (*supporting services*/universitas) dan level mikro (*financial services providers*/lembaga keuangan). Pada level makro 1) Pemerintah & OJK dapat membentuk pola dan skema kolaborasi terintegrasi antar pelaku terkait program pembiayaan kepada UMK, sehingga program-program yang dilakukan dapat lebih terintegrasi. 2) Pemerintah dan OJK dapat mencantumkan secara langsung model/mekanisme kolaborasi terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak didalam berbagai regulasi/kebijakan untuk pembiayaan UMK. Kolaborasi terintegrasi sangat penting untuk mengurangi resiko bagi lembaga keuangan, efektif dan efisiensi program serta keteraturan aktivitas dan peran. 3) Pemerintah seyogyanya mengalokasikan dana untuk menjalankan kolaborasi terintegrasi antar pihak (saat ini masih sangat terbatas).

Pada level meso (univeritas), 1) univeritas memasukkan program kolaborasi didalam kurikulum pendidikan sehingga pola pengajaran dapat diintegrasikan dengan program-program peningkatan akses pembiayaan dan peningkatan kinerja UMK; 2) mengalokasikan dan melibatkan SDM (dosen, mahasiswa dan alumni) untuk melaksanakan kolaborasi dengan program yang terarah. Beberapa keterlibatan SDM dapat dilakukan dalam aktivitas penelitian, pelatihan, pendampingan, magang, *case study* dan aktivitas yang relevan lainnya; dan 3) menggunakan skema-skema pendanaan yang ada dari Kemendikbudristek untuk melakukan kegiatan tridharma perguruan tinggi khususnya terkait program-program membantu UMK dalam akses pembiayaan dan peningkatan kinerjanya. Skema pendanaan seperti kedai reka dapat digunakan untuk menjalankan kolaborasi antara univeritas dengan lembaga keuangan. Pada level mikro (lembaga keuangan), 1) lembaga keuangan bersama-sama dengan universitas dan pihak lainnya membangun pola dan skema kolaborasi terintegrasi. Sinergi dilakukan dengan me-link & matchkan antara keunggulan dan kemampuan yang dimiliki oleh para stakeholder dengan kebutuhan dalam pembiayaan UMK; 2) lembaga keuangan mengalokasikan dana untuk menjalankan kolaborasi antar *stakeholder* untuk membantu pembiayaan UMK. Dana dapat menjadi bagian dari biaya operasional atau dana CSR yang diperuntukkan untuk kolaborasi; dan 3) perlunya perubahan mindset dari lembaga keuangan

bahwa orientasi pembiayaan UMK tidak hanya untuk kepentingan profit namun peningkatan kualitas UMK menjadi hal penting untuk keberlanjutan program pembiayaan untuk UMK. UMK dijadikan subjek untuk melakukan perubahan dan peningkatan kinerja usahanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan lembaga keuangan dalam akses terhadap layanan keuangan mikro (keuangan inklusif) dan upaya peningkatan kinerja UMK dapat dilihat dari sisi *demand* (UMK) dan dari sisi *supply* (lembaga keuangan). Kompleksitas permasalahan dapat diatasi dengan menjalankan mekanisme kolaborasi antar pihak terkait. Kolaborasi antara lembaga keuangan dan universitas menjadi salah satu alternatif solusi untuk memperkuat akses layanan keuangan mikro dan kinerja usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia. Universitas dapat menjalankan fungsinya sebagai *center of excellence* melalui berbagai aktivitas dengan melakukan kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk mendapatkan akses layanan keuangan dan sekaligus membantu penguatan kinerja UMK. Kolaborasi universitas dengan lembaga keuangan dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk mengembangkan solusi yang lebih efisien dan hemat biaya dalam industri keuangan khususnya dalam meningkatkan akses layanan keuangan mikro dan kinerja UMK di Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini, maka beberapa hal yang dapat disarankan diantaranya *pertama*, skema-skema pendanaan untuk mengakselerasi program kolaborasi perlu dirancang secara terkoordinasi dan terintegrasi baik itu program pemerintah, swasta maupun pendanaan dari luar negeri. *Kedua*, Penelitian ini tidak mengkaji terkait peran lembaga-lembaga non formal seperti lembaga berbasis komunitas, berbasis prinsip adat atau agama dan lembaga sejenis lainnya yang memberikan kontribusi dalam memberikan pembiayaan bagi UMK. Oleh karena itu penelitian selanjutnya dapat melakukan kajian terkait lembaga-lembaga tersebut agar dapat lebih memperkaya khasanah keilmuan,

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni D, Herlinawati E. 2019. Analisis model pembiayaan umkm melalui peran lembaga keuangan mikro. *Jurnal Riset Manajemen* 8(1): 21–27. <https://doi.org/10.17509/image.v8i1.23117>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. *Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Checkland P, Poulter J. 2006. Learning for action: a short definitive account of soft systems methodology and its use for practitioners, teachers, and students. Volume 26. Wiley Chichester.
- Hartato A. 2021. *Pembiayaan UMKM*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Huda B, Sukidin S, Wahyuni S. 2019. Pengaruh kualitas pelayanan, prosedur kredit, dan tingkat suku bunga terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Sukowono Arthajaya Jember. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial* 13(1):87–93. <https://doi.org/10.19184/jpe.v13i1.10425>
- ILO. 2019. Financing Small Businesses in Indonesia. International Labour Organization 2019.
- [Kemenko] Kementerian Koordinator Perekonomian. 2018. Apresiasi Kinerja KUR Untuk UMKM, Menko Perekonomian Beri Penghargaan Bagi Penyalur, Penjamin, dan Pemda Berkinerja Terbaik. <https://www.ekon.go.id/berita/print/apresiasi-kinerja-kur-untuk.4377.html>
- [KemenkopUKM] Kementerian Koperasi dan UKM. 2020. Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan UKM. Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta.
- Kusmuljono BS. 2009. *Menciptakan Kesempatan rakyat Berusaha, Sebuah Konsep Baru tentang Hybrid Microfinancing*. Bogor: IPB Press.
- Levie J, Autio E, Acs Z, Hart M. 2014. Global entrepreneurship and institutions: an introduction. *Small Business Economics* 42(3): 437-444. <https://doi.org/10.1007/s11187-013-9516-6>
- Matthews A. 2022. The idea and becoming of a university across time and space: ivory tower, factory and network. *Postdigital Science and Education* 5: 665–693. <https://doi.org/10.1007/s42438-022-00341-0>
- Natalia MA, Kurniasari F, Hendrawaty E. Oktaviani VM. 2020. Pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan dengan menggunakan social capital sebagai variabel mediator. *ULTIMA Management* 12 (1):16-33. <https://doi.org/10.31937/manajemen.v12i1.1522>
- OJK. 2022. Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>
- Octasyilva A. 2021. Pengembangan UMKM Tangerang Selatan melalui pendekatan soft system methodology. *Jurnal IPTEK* 5(1): 11-17. <https://doi.org/10.31543/jii.v5i1.170>
- Ozili PK. 2020. Theories of Financial Inclusion. *SSRN Electronic Journal* 1-23. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3526548>
- Reddy CV.2017. Overall financial inclusion across 55 countries: 12 financial inclusion enabling variables. *SCMS Journal of Indian Management* 14(1): 14-29.
- Robinson MS. 2001. *The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor*. Washington, D.C: The World Bank.
- Soetara A, Macfud, Affandi MJ, Maulana A. 2019. Rancang bangun model strategi operasional implementasi lean manufacturing berkesinambungan untuk peningkatan produktivitas industri pengolahan kayu di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)* 5(2): 187–199. <https://doi.org/10.17358/jabm.5.2.187>
- Tambunan T. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia Isu-isu Penting*. Jakarta: LP3ES.
- Tambunan TT.H. 2018. The performance of indonesia’s public credit guarantee scheme for msme a regional comparative perspective. *Journal of Southeast Asian Economies* 35(2): 319–32. <https://doi.org/10.1355/ae35-21>
- Uddin AA, Chowdhury MAF, Islam N. 2017, Determinants of financial inclusion in Bangladesh: Dynamic GMM and quantile regression approach. *Journal of Developing Areas* 51(2): 221-237. <https://doi.org/10.1353/jda.2017.0041>
- Urata S. 2020. Policy recommendatins: outline of tentattive policy recomendation for sme promotion in indonesia, Publikasi JICA 17 Mei 2007.
- World Bank. 2006. *Access for All: Building Inclusive Financial Systems*. World Bank. Washington, DC.